

**PENGARUH IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL,
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI



Ditulis Oleh :

Nama : Fitriana
Nomor Mahasiswa : 153215273
Jurusan : Akuntansi
Bidang Konsentrasi : Sistem Informasi Akuntansi
dan Pengauditan

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntansi berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan secara simultan, implementasi akuntansi berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kata Kunci : Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena dengan limpahan Rahmat dan Hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL”.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Keberhasilan menyelesaikan penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan berkah dan nikmat kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini,
2. Bapak Drs. Muhammad Subkhan, MM selaku ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta,
3. Bapak Drs. Achmad Tjahyono, MM, Ak selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini,
4. Semua dosen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan,
5. Orangtua yang senantiasa memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan kuliah untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi,

6. Abi Septian Hardianto yang selalu mendukung dan membantu kelancaran dalam menyusun skripsi ini,
7. Anak Mamah Alya Nafhah Zhafira yang selalu memahami bahwa orangtuanya sedang berjuang menyelesaikan kuliah,
8. Teman satu bimbingan yang selalu berbagi informasi dan saling memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini,
9. Serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yogyakarta, Maret 2018

Fitriana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Batasan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Implementasi akuntansi Berbasis AkruaI	10
2.1.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia	12
2.1.3 Sistem Pengendalian Intern	13

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan	14
2.2 Penelitian Terdahulu	17
2.3 Kerangka Pemikiran	21
2.4 Pengembangan Hipotesis	21
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Objek Penelitian	25
3.1.1 Sejarah Singkat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	25
3.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	27
3.2 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	29
3.3 Metode Pengumpulan Data	31
3.4 Sumber Data Penelitian	31
3.5 Populasi dan Sampel	32
3.6 Metode Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Hasil Penelitian	39
4.2 Pembahasan	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Keterbatasan Penelitian	56
5.3 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian	30
Tabel 3.2 Skor Untuk Setiap Pernyataan	31
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas	40
Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas	41
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas	42
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas Tingkat Korelasi	43
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolonieritas Nilai <i>Tolerance</i> dan VIF	44
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	45
Tabel 4.7 Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda	46
Tabel 4.8 Koefisien Determinasi	47
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik F	48
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik t	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	21
-------------------------------------	----

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian	60
Lampiran 2 Output SPSS	62

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, perusahaan milik daerah atau negara, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya (Mardiasmo, 2009;1).

Perkembangan ilmu akuntansi sektor publik yang diterapkan di sebuah instansi Pemerintah Daerah memang sudah seharusnya dilakukan. Kemajuan teknologi yang semakin pesat juga menjadi pendorong utama hal tersebut. Banyak pihak yang mengharapkan tersedianya laporan keuangan Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut yang mendasari perlu adanya perubahan di bidang akuntansi sektor publik. Perubahan di bidang akuntansi harus didasari dengan suatu dasar yang kuat yaitu dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Diterbitkannya PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP diharapkan dapat menjadi patokan serta standar untuk diterapkan dalam lingkup pemerintahan yang dapat digunakan dalam penyajian laporan keuangan agar lebih terciptanya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan daerah tersebut. Peraturan ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap daerah

termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagai pengguna anggaran yang wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya.

Pengertian Akuntansi berbasis akrual menurut PP No 71 Tahun 2010 adalah basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Dalam konteks daerah, pengakuan dan pencatatan transaksi akuntansi pada basis akrual adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan diakui atau dicatat pada saat timbulnya hak dan tidak semata-mata pada saat kas masuk ke kas daerah
2. Belanja diakui atau dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau tidak selalu pada saat kas keluar dari kas daerah
3. Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal
4. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Implementasi akuntansi berbasis akrual ini perlu dipahami oleh sumber daya manusia yang terkait dalam proses pembuatan laporan keuangan. Tidak dipungkiri, sumber daya manusia yang berkompeten sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang berperan aktif dalam kegiatan pembuatan laporan keuangan

sektor publik juga dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya penerapan SAP dengan baik.

Menurut keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor : 46A tahun 2003 tentang pengertian kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien.

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasaannya (Hasibuan, 2003).

Menurut Mangkunegara (2012) kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya. Kompetensi sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pemerintahan terutama pembuatan laporan keuangan sangat diharapkan.

Selain itu, kegiatan lain yang ada di pemerintahan adalah sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern diharapkan dapat menjamin laporan keuangan yang berkualitas. Tingginya kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah juga ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal yang dimiliki institusi Pemerintah Daerah. Pengendalian intern yang lemah

menyebabkan sulitnya mendeteksi kecurangan atau ketidakakuratan proses akuntansi.

Menurut Sukrisno (2008) pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personal lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah ditentukan oleh banyak faktor. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan (Mulyana, 2010). Beberapa kualitas penting informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan menurut SAP yaitu relevan (*relevance*), andal (*reliable*), dapat dibandingkan (*comparability*) dan dapat dipahami (*understandability*).

Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk

pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi (Mardiasmo, 2009).

Menurut Masmudi (2003) definisi laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

Laporan keuangan bukan merupakan satu-satunya sumber informasi untuk pengambilan keputusan, akan tetapi laporan keuangan sebagai sumber informasi finansial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Dalam akuntansi sektor publik jenis informasi yang diberikan untuk pengambilan keputusan adalah terbatas pada informasi yang bersifat finansial saja. Informasi finansial yang dimaksud adalah informasi yang dapat diukur dengan moneter.

Menurut Mardiasmo (2009) tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintahan adalah (1) memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintahan, (2) memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya, (3) memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan, (4) memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi

dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional, (5) memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Diterbitkan Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah. Dalam Permendagri No 64 Tahun 2013 Pasal 10 ayat (2) menyatakan penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Penerapan SAP berbasis akrual yang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun ini juga sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul.

Penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk penelitian dikarenakan hal yang terkait dengan pelaporan keuangan sangat berpengaruh dalam peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Dari uraian diatas maka judul penelitian tersebut adalah Pengaruh Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Penelitian ini diharapkan dapat menunjukan gambaran bagaimana pengaruh dalam pelaksanaan pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAP berbasis akrual, kesesuaian kebutuhan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pembuatan pelaporan keuangan, serta pengaruh sistem pengendalian intern di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul?
4. Apakah implementasi akuntansi berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul?

1.3 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan mendalam maka permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, hal yang diteliti hanya berkaitan dengan “ Pengaruh Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.” Kualitas laporan keuangan di pilih karena hal tersebut dapat membantu dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pokok yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan:

1. Pengaruh implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
2. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
3. Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
4. Pengaruh implementasi akuntansi berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan 2 (dua) bentuk manfaat yang diantaranya:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan tentang konsep pengaruh implementasi akuntansi berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul. Selain itu juga dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis, bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul diharapkan dapat memberikan gambaran tentang hal yang mempengaruhi dalam

pemerintahan yang berkaitan dengan laporan keuangan dengan adanya implementasi akuntansi berbasis akrual, sumber daya yang kompeten dan juga sistem pengendalian intern yang baik.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Akuntansi Berbasis Akrua

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi (Mardiasmo, 2009:159).

Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Kebijakan Akuntansi Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap

anggaran, antar periode maupun antar entitas. (Permendagri No 64 Tahun 2013).

Akuntansi berbasis akrual menurut PP No 71 Tahun 2010 adalah basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Dalam konteks daerah, pengakuan dan pencatatan transaksi akuntansi pada basis akrual adalah :

- a. Pendapatan diakui atau dicatat pada saat timbulnya hak dan tidak semata-mata pada saat kas masuk ke kas daerah,
- b. Belanja diakui atau dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau tidak selalu pada saat kas keluar dari kas daerah,
- c. Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal,
- d. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD (Permendagri No 64 Tahun 2013).

1.6.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor : 46A tahun 2003 tentang pengertian kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien.

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasaannya (Hasibuan, 2003).

Sumber daya manusia adalah tenaga kerja atau pegawai di dalam suatu organisasi yang mempunyai peran penting dalam mencapai keberhasilan (Sedarmayanti, 2009:27).

Sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Keterlibatan bias berarti penerima manfaat, keterlibatan juga bisa berarti pemasok input dan pelaksana kegiatan (Hasibuan, 2000:3)

Menurut Mangkunegara (2012) kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang

mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya. Kompetensi sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pemerintahan terutama pembuatan laporan keuangan sangat diharapkan.

1.6.3 Sistem Pengendalian Intern

Menurut Sukrisno (2008) pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personal lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

1.6.4 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan (Mulyana, 2010). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Tanjung, 2012).

Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Menurut Masmudi (2003) definisi laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih,

arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Permendagri No 64 Tahun 2013, Lampiran I).

Menurut Mardiasmo (2009:163) tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintahan adalah (1) memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintahan, (2) memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya, (3) memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan, (4) memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional, (5) memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Beberapa kualitas penting informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan menurut SAP yaitu relevan (*relevance*), andal (*reliable*), dapat dibandingkan (*comparability*) dan dapat dipahami (*understandability*).

a. Relevan

Laporan Keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikatnya atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintahan menerapkan kebijakan akuntansi yang

lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

1.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian pada subjek yang berbeda, diantaranya :

- a. Kiranayanti dan Erawati (2016) dengan judul Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akruaI terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi berbasis akruaI mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

- b. Wijayanti dan Handayani (2017) dengan judul Pengaruh Kompetensi SDM dan Implementasi Akuntansi AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan implementasi akuntansi berbasis akruaI terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Madiun. Data yang digunakan adalah data primer. Sumber data yang digunakan yaitu hasil dari kuesioner oleh responden. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan implementasi akuntansi berbasis akruaI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- c. Septiana (2017) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan mengetahui pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan audit internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

- d. Roviyantie (2014) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun simultan kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas yang berada di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan secara simultan kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- e. Windiastuti (2013) dengan judul Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Bandung). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah

Daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu secara bersama-sama sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan Daerah Kota Bandung.

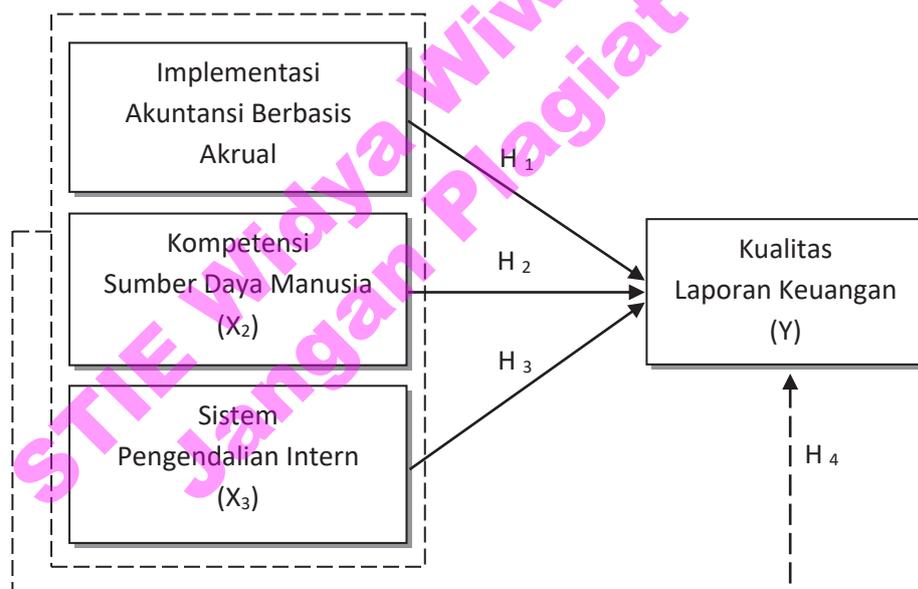
- f. Nurillah (2014) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, pemanfaatan Teknologi Informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- g. Christanti (2013) dengan judul Pengaruh Akuntansi Berbasis AkruaI dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Biro Keuangan Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat). Akuntansi Berbasis AkruaI dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Akuntansi Berbasis AkruaI secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Selain itu secara simultan Akuntansi Berbasis AkruaI dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

1.8 Kerangka Pemikiran

Gambar berikut merupakan kerangka pemikiran penelitian ini:

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran



1.9 Pengembangan Hipotesis

Akuntansi berbasis akrual menurut PP No 71 Tahun 2010 adalah basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Wijayanti dan Handayani (2017) yang

menyatakan bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Madiun. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika implementasi akuntansi berbasis akrual semakin baik, maka semakin berkualitas juga laporan keuangan daerah yang dihasilkan. Christanti (2013) menyatakan bahwa akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa harus segera diterapkan akuntansi berbasis akrual di Provinsi Jawa Barat guna meningkatkan kualitas laporan keuangan agar dapat mendukung peraturan pemerintah yang sudah ada. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₁ : Implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah.

Menurut keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor : 46A tahun 2003 tentang pengertian kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Septiana (2017) dan Roviyantie (2014) keduanya menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini mengindikasikan, semakin baik kompetensi sumber daya manusia yang

dimiliki OPD, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah. Namun, Wijayanti dan Handayani (2017) mengungkapkan hal yang berbeda, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₂ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wijayanti dan Handayani (2017) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian Kiranayanti dan Erawati (2014) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₃ : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka pengaruh implementasi akuntansi berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₄ : Implementasi akuntansi berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Letak OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terbagi menjadi 2 (dua) lokasi, di Komplek Kantor Bupati Bantul dengan alamat Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul dan di Komplek Pemda II dengan alamat Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul.

3.1.1 Sejarah Singkat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Bantul memang tak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Bantul menyimpan banyak kisah kepahlawanan. Antara lain, perlawanan Pangeran Mangkubumi di Ambar Ketawang dan upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret. Perjuangan Pangeran Diponegoro di Selarong. Kisah perjuangan pioner penerbangan Indonesia yaitu Adisucipto, pesawat yang ditumpanginya jatuh ditembak Belanda di Desa Ngoto. Sebuah peristiwa yang penting dicatat adalah Perang Gerilya melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman (1948) yang banyak bergerak di sekitar wilayah Bantul. Wilayah ini pula yang menjadi basis, "Serangan Oemoem 1 Maret" (1949) yang dicituskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Tolak awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.

Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Deggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 sapar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.

Tanggal 20 Juli ini lah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada Usamu Seirei nomor 13 sedangkan stadsgemente ordonantie dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom).

Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948. dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.

Seiring dengan perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan silih bergantinya kepemimpinan nasional, kini ini Kabupaten Bantul telah mengalami kemajuan pesat diberbagai bidang dibawah kepemimpinan Drs. HM. Idham Samawi yang menjabat sejak akhir tahun 1999.

3.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Adapun Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul:

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan

kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Adapun Misi Kabupaten Bantul sesuai RPJMD tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

- Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur
 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan
 4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana
 5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

3.2 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen (variable bebas) adalah variabel yang menjadi sebab atau berubah/mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah implementasi akuntansi berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern. Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel lain atau variabel bebas (Siregar, 2017). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Tabel 3.1.
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual (X1)	Basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. (PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP)	1) Pengakuan Pendapatan 2) Pengakuan Belanja 3) Pengakuan Aset 4) Pengakuan Kewajiban (PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP)	Interval
Kompetensi SDM (X2)	Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. (Keputusan Kepala BKN No. 46A Tahun 2003)	1) Pengetahuan 2) Keterampilan 3) Sikap (Keputusan Kepala BKN No. 46A Tahun 2003)	Interval
Sistem Pengendalian Intern (X3)	Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personal lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. (Agoes, 2008)	1) Keandalan Laporan Keuangan 2) Efektifitas dan efisiensi 3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Agoes, 2008)	Interval
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. (PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP)	1) Relevan 2) Andal 3) Dapat dibandingkan 4) Dapat dipahami (PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP)	Interval

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara atau jalan yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakter beberapa orang utama di dalam organisasi, yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau sistem yang sudah ada.

Jenis kuesioner yang digunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup dengan penerapan skala likert. Jadi, dalam kuesioner jenis ini responden tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat.

Tabel 3.2
Skor untuk setiap pernyataan

Jawaban	Nilai Positif	Nilai Negatif
Sangat Setuju (SS)	5	1
Setuju (S)	4	2
Netral (N)	3	3
Tidak Setuju (TS)	2	4
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5

3.4 Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan dari subjek atau objek penelitian. Kuesioner akan diberikan kepada beberapa OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang berada di Komplek Kantor Bupati Bantul maupun Komplek Pemda II Bantul.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka dari penjelasan tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah semua staf pada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Sampel dalam penelitian ini akan diambil berdasarkan metode sampling purposive yaitu teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu. Maka sampel dalam penelitian ini adalah staf bagian keuangan OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang tugasnya berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan.

3.6 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini akan digunakan metode analisis kuantitatif dan data yang terkumpul diuji dengan analisis regresi linier berganda dengan bantuan *software* SPSS versi 20. Metode ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Kuesioner akan diolah melalui beberapa tahap pengujian yang terdiri dari:

1. Uji Kualitas Data

a) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh

kuesioner tersebut (Ghozali, 2009:49). Rumus yang digunakan untuk uji validitas dengan teknik korelasi *product moment*, yaitu :

$$r_{hitung} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n(\sum X^2) - (\sum X)^2][n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan :

n = jumlah responden

x = skor variabel (jawaban responden)

y = skor total dari variabel untuk responden ke $- n$

Suatu instrument penelitian dikatakan valid, bila :

- 1) Koefisien korelasi *product moment* melebihi 0,3 (Azwar, 1992; Soegiyono, 1999).
- 2) Koefisien korelasi *product moment* > r-tabel (α ; $n - 2$) n = jumlah sampel.
- 3) Nilai sig $\leq \alpha$

b) Uji Reliabilitas

Suatu Kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2009:45).

Teknik pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1) *Repeated Measure* atau pengukuran ulang

Disini seseorang akan disodorkan pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda dan kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya.

2) *One Shot* atau pengukuran sekali saja

Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan.

Teknik pengukuran reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One Shot* dengan uji statistik *alpha cronbach* dengan bantuan SPSS versi 20. Teknik atau rumus ini dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu instrument penelitian reabel atau tidak, bila jawaban responden berbentuk skala atau jawaban responden yang menginterpretasikan penilaian sikap.

Tahapan perhitungan uji reliabilitas dengan menggunakan uji statistik *alpha cronbach*, yaitu :

1) Menentukan nilai varian setiap butir pertanyaan

$$\sigma_i^2 = \frac{\sum X_i^2 - \frac{(\sum X_i)^2}{n}}{n}$$

2) Menentukan nilai varian total

$$\sigma_i^2 = \frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}}{n}$$

3) Menentukan reliabilitas instrument

$$r_{11} = \frac{k}{k-1} \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

X_i = Jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan

$\sum X$ = Total Jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan

σ_t^2 = Varian total

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varian butir

k = Jumlah butir pertanyaan

r_{11} = Koefisien reliabilitas instrument

Menurut kriteria Nunnally (1960) yang dinyatakan dalam Ghozali (2009;46) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60.

2. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2009;147). Model regresi yang baik adalah data distribusi data normal atau mendekati normal. Penelitian ini menggunakan metode *Kolmogrov-Smirnov test* yang dilakukan

menggunakan bantuan *software* SPSS versi 20. Pengambilan keputusan pada pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* ini dilakukan sebagai berikut:

- *Asymp.Sig* < 0,05 = Distribusi tidak normal
- *Asymp.Sig* > 0,05 = Distribusi normal

b) Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau variabel independen (Ghozali, 2009;95). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas atau variabel independen. Multikolonieritas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*. Regresi bebas dari multikolonieritas jika besar nilai $VIF \leq 10$ dan nilai *tolerance* $\geq 0,10$ (Ghozali, 2009;96).

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 2009;125). Model regresi yang baik apabila varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau homoskedastisitas.

Metode yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan uji glejser dengan probabilitas signifikansi diatas tingkat kepercayaan $\alpha = 5\%$ atau 0,05 (Ghozali, 2009;129).

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan metode ini untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (*independent*) terhadap satu variabel tak bebas (*dependent*) (Siregar, 2017;405).

Rumus :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

Y = Variabel terikat

X_1 = Variabel bebas pertama

X_2 = Variabel bebas kedua

X_3 = Variabel bebas ketiga

a dan b_1 serta b_2 = konstanta

4. Pengujian Hipotesis

1) Uji Koefisien Determinan

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009;87). Hasil koefisien determinasi ini dapat dilihat dari perhitungan dengan program *software* SPSS versi 20 atau dengan rumus manual koefisien determinasi sebagai berikut :

$$KD = (r)^2 \times 100\%$$

Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$), nilai R^2 yang mendekati 0 menunjukkan kemampuan variabel independen sangat terbatas dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 yang mendekati angka 1 menunjukkan semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

2) Uji Statistik F (*F-test*)

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika dari hasil pengujian diperoleh nilai signifikan kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009;88).

3) Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen. Jika dari hasil pengujian diperoleh nilai signifikan dari masing-masing variabel kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. (Ghozali, 2009;91).

Uji statistik t dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} , jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka H_0 ditolak dan H_a diterima demikian juga sebaliknya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis memperoleh data hasil kuesioner mengenai Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, yang kemudian akan diolah menggunakan perhitungan statistik dengan *software* SPSS versi 20.

Kuesioner yang disebarakan kepada 25 OPD di Pemerintah Kabupaten Bantul sejumlah 125 kuesioner. Hingga batas akhir pengumpulan data, kuesioner yang diterima kembali sebanyak 101.

1. Uji Kualitas Data

a) Uji Validitas

Berdasarkan hasil olah data pada Tabel 4.1 dengan bantuan SPSS versi 20 dapat diketahui bahwa semua butir pernyataan dinyatakan valid atau mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut karena telah memenuhi syarat yaitu, koefisien korelasi *product moment* atau nilai r_{hitung} lebih besar dari $r_{tabel} = (α ; n - 2) = 0,1646$ dan nilai $sig \leq 0,05$ artinya korelasi antara masing-masing pernyataan dari masing-masing variabel terhadap total skor menunjukkan hasil yang signifikan.

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas

Pernyataan	<i>r</i>_{hitung}	Nilai sig	Hasil
AKRUAL 1	0,608	0,000	Valid
AKRUAL 2	0,662	0,000	Valid
AKRUAL 3	0,692	0,000	Valid
AKRUAL 4	0,635	0,000	Valid
AKRUAL 5	0,694	0,000	Valid
AKRUAL 6	0,711	0,000	Valid
AKRUAL 7	0,728	0,000	Valid
AKRUAL 8	0,687	0,000	Valid
AKRUAL 9	0,725	0,000	Valid
AKRUAL 10	0,745	0,000	Valid
SDM 1	0,758	0,000	Valid
SDM 2	0,672	0,000	Valid
SDM 3	0,722	0,000	Valid
SDM 4	0,796	0,000	Valid
SDM 5	0,626	0,000	Valid
SDM 6	0,605	0,000	Valid
SDM 7	0,774	0,000	Valid
SDM 8	0,640	0,000	Valid
SPI 1	0,702	0,000	Valid
SPI 2	0,747	0,000	Valid
SPI 3	0,748	0,000	Valid
SPI 4	0,802	0,000	Valid
SPI 5	0,795	0,000	Valid
SPI 6	0,761	0,000	Valid
LAPORAN 1	0,793	0,000	Valid
LAPORAN 2	0,741	0,000	Valid
LAPORAN 3	0,815	0,000	Valid
LAPORAN 4	0,786	0,000	Valid
LAPORAN 5	0,748	0,000	Valid
LAPORAN 6	0,679	0,000	Valid
LAPORAN 7	0,683	0,000	Valid
LAPORAN 8	0,811	0,000	Valid
LAPORAN 9	0,796	0,000	Valid
LAPORAN 10	0,798	0,000	Valid
LAPORAN 11	0,817	0,000	Valid
LAPORAN 12	0,791	0,000	Valid
LAPORAN 13	0,864	0,000	Valid
LAPORAN 14	0,874	0,000	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer

b) Uji Reliability

Teknik pengukuran reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One Shot* dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. SPSS versi 20 memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik

Cronbach Alpha. Berdasarkan hasil olah data pada Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa semua variabel dikatakan reliabel atau hasil pengukuran tetap konsisten karena telah memenuhi syarat yaitu, nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 (Nunnally, 1960).

Tabel 4.2
Hasil Uji Reliability

Variabel	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Hasil
Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua	0,871	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,843	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern	0,853	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0,951	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer

2. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2009;147). Model regresi yang baik adalah data distribusi data normal atau mendekati normal. Penelitian ini menggunakan metode *Kolmogrov-Smirnov test* yang dilakukan menggunakan bantuan *software* SPSS versi 20. Pengambilan keputusan pada pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* ini dilakukan sebagai berikut:

- *Asymp.Sig* < 0,05 = Distribusi tidak normal
- *Asymp.Sig* > 0,05 = Distribusi normal

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		101
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3.52415474
	Absolute	.100
Most Extreme Differences	Positive	.100
	Negative	-.090
Kolmogorov-Smirnov Z		1.007
Asymp. Sig. (2-tailed)		.262

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.3 menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 1,007 dengan signifikansi 0,262 > 0,05 maka dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

b) Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau variabel indepeden (Ghozali, 2009;95). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas atau variabel independen. Multikolonieritas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*. Regresi bebas dari multikolonieritas jika besar nilai VIF ≤ 10 dan nilai *tolerance* $\geq 0,10$ (Ghozali, 2009;96).

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolonieritas Tingkat Korelasi
Coefficient Correlations^a

Model		SPI	SDM	AKRUAL	
1	Correlations	SPI	1.000	-.298	-.427
		SDM	-.298	1.000	-.412
		AKRUAL	-.427	-.412	1.000
	Covariances	SPI	.034	-.006	-.009
		SDM	-.006	.013	-.005
		AKRUAL	-.009	-.005	.013

a. Dependent Variable: LAPORAN

Melihat hasil besaran korelasi antar variabel independen pada Tabel 4.4 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Variabel SPI dengan variabel SDM mempunyai tingkat korelasi sebesar $-0,298$ atau sekitar $30\% \leq 95\%$, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas.
- 2) Variabel SPI dengan variabel AKRUAL mempunyai tingkat korelasi sebesar $-0,427$ atau sekitar $42\% \leq 95\%$, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas.
- 3) Variabel SDM dengan variabel AKRUAL mempunyai tingkat korelasi sebesar $-0,412$ atau sekitar $41\% \leq 95\%$, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas.

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolonieritas Nilai *Tolerance* dan *VIF*
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	11.112	3.680		3.019	.003		
1							
AKRUAL	.253	.112	.197	2.265	.026	.498	2.006
SDM	.127	.114	.091	1.109	.270	.555	1.801
SPI	1.320	.184	.596	7.179	.000	.547	1.829

a. Dependent Variable: LAPORAN

Hasil perhitungan nilai *tolerance* juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

c) Uji Heteroskedasitas

Metode yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan uji glejser dengan probabilitas signifikansi diatas tingkat kepercayaan $\alpha = 5\%$ atau 0,05 (Ghozali, 2009;129). Model regresi yang baik apabila varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau homokedastisitas.

Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	-.432	2.520			
1	AKRUAL	.070	.077	.130	.911	.364
	SDM	-.031	.078	-.053	-.395	.694
	SPI	.043	.126	.047	.342	.733

a. Dependent Variable: RES2

Dapat dilihat pada Tabel 4.6 hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi semua variabel independen > 0,05, sehingga model regresi ini layak digunakan karena pada model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan Keuangan

X_1 = Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua

X_2 = Kompetensi Sumber Daya Manusia

X_3 = Sistem Pengendalian Intern

a, b_1, b_2 dan b_3 = Konstanta

Dengan bantuan SPSS versi 20, diperoleh hasil regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 4.7
Persamaan Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	11.112	3.680			
1	AKRUAL	.253	.112	.197	2.265	.026
	SDM	.127	.114	.091	1.109	.270
	SPI	1.320	.184	.596	7.179	.000

a. Dependent Variable: LAPORAN

Dari Tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa nilai $a = 11,112$ nilai $b_1 = 0,253$ nilai $b_2 = 0,127$ dan nilai $b_3 = 1,320$ sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 11,112 + 0,253X_1 + 0,127X_2 + 1,320X_3$$

Persamaan diatas dapat diartikan sebagai berikut:

- a) $a = 11,112$ artinya jika variabel implementasi akuntansi berbasis akrual (X_1), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) dan sistem pengendalian intern (X_3) bernilai nol (0) maka variabel kualitas laporan keuangan (Y) akan bernilai 11,112.
- b) $b_1 = 0,253$ artinya jika variabel implementasi akuntansi berbasis akrual (X_1) meningkat sebanyak satu satuan, maka variabel kualitas laporan keuangan (Y) akan meningkat sebesar 0,253.

c) $b_2 = 0,127$ artinya jika variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) meningkat sebanyak satu satuan, maka variabel kualitas laporan keuangan (Y) akan meningkat sebesar 0,127.

d) $b_3 = 1,320$ artinya jika variabel sistem pengendalian intern (X_3) meningkat sebanyak satu satuan, maka variabel kualitas laporan keuangan (Y) akan meningkat sebesar 1,320.

4. Pengujian Hipotesis

a) Uji Koefisien Determinan

Dengan bantuan SPSS versi 20 dari Tabel 4.8 dibawah ini dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi atau *R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,635 atau 63,5%. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan implementasi akuntansi berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern memberikan kontribusi pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 63,5% sedangkan sisanya $100\% - 63,5\% = 36,5\%$ merupakan pengaruh variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 4.8
Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.797 ^a	.635	.624	3.578	.635	56.261	3	97	.000

a. Predictors: (Constant), SPI, SDM, AKRUAL

b. Dependent Variable: LAPORAN

b) Uji Statistik F (*F-test*)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji f) dengan menggunakan SPSS versi 20 pada Tabel 4.9, didapat nilai signifikansi model regresi secara simultan sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari *significance level* 0,05%, yaitu $0,000 < 0,05$. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara f_{hitung} dan f_{tabel} yang menunjukkan nilai f_{hitung} sebesar 56,261 sedangkan f_{tabel} sebesar 2,70. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $f_{hitung} > f_{tabel}$ yaitu $56,261 > 2,70$, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau secara bersama-sama variabel implementasi akuntansi berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 4.9
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2161.043	3	720.348	56.261	.000 ^b
	Residual	1241.967	97	12.804		
	Total	3403.010	100			

a. Dependent Variable: LAPORAN

b. Predictors: (Constant), SPI, SDM, AKRUAL

c) Uji Statistik t

Dari uji hipotesis parsial dengan uji t pada Tabel 4.10, maka dapat dilihat bahwa variabel implementasi akuntansi berbasis akrual dan variabel sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dikarenakan nilai sig lebih kecil dari 0,05

dan t_{hitung} variabel tersebut lebih besar dari nilai t_{tabel} . Sedangkan untuk variabel kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dikarenakan nilai sig lebih besar dari 0,05 dan t_{hitung} variabel tersebut lebih kecil dari nilai t_{tabel} .

Tabel 4.10
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	11.112	3.680			
1	AKRUAL	.253	.112	.197	2.265	.026
	SDM	.127	.114	.091	1.109	.270
	SPI	1.320	.184	.596	7.179	.000

a. Dependent Variable: LAPORAN

- Untuk variabel implementasi akuntansi berbasis akrual diperoleh nilai sig $0,026 < 0,05$ maka berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan dan $t_{hitung} = 2,265 > t_{tabel} = 1,6607$ maka H_0 ditolak H_a diterima.
- Untuk variabel kompetensi sumber daya manusia diperoleh nilai sig $0,270 > 0,05$ maka tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan dan $t_{hitung} = 1,109 < t_{tabel} = 1,6607$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- Untuk variabel sistem pengendalian intern diperoleh nilai sig $0,000 < 0,05$ maka berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas

laporan keuangan dan $t_{hitung} = 7,179 > t_{tabel} = 1,6607$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

4.2 Pembahasan

Pengaruh Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa peningkatan Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI mampu untuk meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Sehingga dengan meningkatkan Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI mampu mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Dari hasil pengujian menyatakan bahwa Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI signifikan mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul secara parsial, dengan tingkat signifikansi 0,05 maka didapat t_{hitung} sebesar 2,265 dan t_{tabel} sebesar 1,6607 sehingga $t_{hitung} = 2,265 > t_{tabel} = 1,6607$. Berdasarkan formula yang diuraikan pada pengujian hipotesis, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi akuntansi berbasis akruaI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijayanti dan Handayani (2017) dan Kiranayanti dan Erawati (2016) yang menyimpulkan bahwa implementasi akuntansi berbasis

akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sehingga hal ini mendukung perumusan H_1 bahwa variabel implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian tidak menunjukkan bahwa peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia mampu untuk meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa jawaban responden yang menyatakan bahwa jumlah sub bagian keuangan tidak ada 10% yang merupakan lulusan D3 Akuntansi atau lebih tinggi.

Dari hasil pengujian menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak signifikan mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul secara parsial, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka didapat $t_{hitung} = 1,109$ dan t_{tabel} sebesar 1,6607 sehingga $t_{hitung} = 1,109 < t_{tabel} = 1,6607$. Berdasarkan formula yang diuraikan pada pengujian hipotesis, maka H_0 diterima dan H_2 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijayanti dan Handayani (2017) yang menunjukkan bahwa

kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiranayati dan Erawati (2016), Septiana (2017) , Roviyantie (2014), Windiastuti (2013) dan Christanti (2013) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan .

Hasil penelitian ini tidak mendukung perumusan H₂ yang berarti bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa peningkatan Sistem Pengendalian Intern mampu untuk meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Sehingga dengan meningkatkan Sistem Pengendalian Intern mampu mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Dari hasil pengujian menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern signifikan mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul secara parsial, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka didapat t_{hitung} sebesar 7,179 dan t_{tabel} sebesar 1,6607 sehingga $t_{hitung} = 7,179 > t_{tabel} = 1,6607$. Berdasarkan formula yang diuraikan pada pengujian hipotesis, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima, sehingga dapat disimpulkan

bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kiranayanti dan Erawati (2016), Windiastuti (2013) dan Christanti (2013) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini berarti mendukung perumusan hipotesis 3 bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat dari hasil perbandingan antara f_{hitung} dan f_{tabel} yang menunjukkan nilai f_{hitung} sebesar 56,261 sedangkan f_{tabel} sebesar 2,70. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $f_{hitung} > f_{tabel}$ yaitu $56,261 > 2,70$, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau secara bersama-sama variabel implementasi akuntansi berbasis akrua, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kiranayanti dan Erawati (2016) dan Nurillah (2014) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian

intern, dan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi berbasis akrual mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah yang berarti mendukung perumusan H₄ bahwa Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti mengenai hubungan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua semakin baik, maka semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang dihasilkan.
2. Kapasitas Sumber Daya Manusia di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Hal ini terjadi karena masih banyak karyawan di sub bagian keuangan di OPD yang tidak memiliki latar belakang lulusan D3 Akuntansi atau lebih tinggi.
3. Sistem Pengendalian Intern di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Hal ini mengindikasikan bahwa

ketika Sistem Pengendalian Intern semakin baik, maka semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang dihasilkan.

4. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa keterbatasan dan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) variabel independen yaitu implementasi akuntansi berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern dengan 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian adalah 63,5%, hal ini menunjukkan bahwa secara simultan implementasi akuntansi berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern memberikan kontribusi pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 63,5% sedangkan sisanya 36,5% merupakan pengaruh variabel lain yang belum diteliti.
2. Sampel dalam penelitian ini adalah staf bagian keuangan OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang tugasnya berkaitan dengan

pembuatan laporan keuangan. Masih ada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten lain yang belum diteliti pengaruh implementasi akuntansi berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan ialah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menguji variabel-variabel lain yang belum diteliti pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Variabel lain yang bisa diteliti pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan misalnya, sistem informasi akuntansi dan fasilitas kerja.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel dalam penelitian, misalnya yang diteliti adalah provinsi DI Yogyakarta. Selain itu juga dapat menguji pengaruh implementasi akuntansi berbasis akrual, kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Christanti, Dianne Natalia (2013). “Pengaruh Akuntansi Berbasis AkruaL Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survey Pada Biro Keuangan Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat)”. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia*. Bandung.
- Deddy, Mulyana. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Ghozali, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan keempat, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, Malaya S.P. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kiranayanti, Ida Ayu Enny dan Made Adi Erawati, Ni. (2016). “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis AkruaL Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”. *Jurnal Akuntansi Vol. 16 No 2 Hal 1290-1318*. Universitas Udayana. Bali.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.
- Masmudi. (2003). “Laporan Keuangan Sektor Publik, Antara Konsep dan Praktek”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Vol 3, No 1*.
- Nurillah, As Syifa. (2014). “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok)”. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Republik Indonesia. 2003. *Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Jakarta

- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Roviyantie, Devi. (2014). “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survey pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya)”. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi*. Tasikmalaya.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju
- Septiana, Lola. (2017). “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto)”. *Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1. Universitas Negeri Padang*. Padang.
- Siregar, Syofian. (2017). *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Cetakan Keempat, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sukrisno, Agoes. (2008). *Auditing Pemeriksaan Oleh Akuntan Publik Jilid Satu*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tanjung, Abdul Hafiz. (2012). *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Wijayanti, Ratna dan Handayani, Nur. (2017). “Pengaruh Kompetensi SDM Dan Implementasi Akuntansi Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Pada Pemerintah Kabupaten Madiun)”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 3*. Stiesia Surabaya.
- Windiastuti, Ruri. (2013). “Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Bandung)”. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama*. Bandung.